

## **INTISARI**

Disahkannya undang–undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu perubahan kebijakan fiskal yang cukup fundamental bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdampak pada konsekuensi perubahan yang cukup signifikan mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam penerimaan dan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara deskriptif pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB P2) di Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan analisa empat kuadran Friedman dan analisa rasio.

Kata kunci : otonomi daerah, Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kota Yogyakarta, empat kuadran Friedman, analisa rasio.

## **ABSTRACT**

Disahkannya undang–undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu perubahan kebijakan fiskal yang cukup fundamental bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdampak pada konsekuensi perubahan yang cukup signifikan mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam penerimaan dan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara deskriptif pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB P2) di Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan analisa empat kuadran Friedman dan analisa rasio.

Keywords: IFRS adoption, developing countries, Indonesia, the quality of earnings information, manufacturing company.